

**ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
(KASUS : 35 KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2012)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**AGUS WINARENDRA  
NIM. 12020110141042**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Agus Winarendra  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141042  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI  
(KASUS : 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA  
TENGAH TAHUN 2008-2012)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 September 2014**

Tim Penguji

1. Dr. Nugroho SBM, MSP (.....)
2. Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si. (.....)
3. Fitri Arianti, SE., M.Si (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.com. Ph.D. Akt

NIP 19670809 199203 1001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Seorang pelajar yang cerdas adalah ia yang mencari ilmu dengan kegigihan dan kesabaran”*

*“Dalam proses belajar jangan jadikan nilai sebagai parameter. Kecerdasan seseorang tidak bisa dinilai dengan angka-angka yang mampu memastikan kesuksesan, tingkat kedewasaan, dan keteguhan seseorang”*

*“Jadikanlah pribadianmu yang bermanfaat bagi sesama”*

Skripsi ini kupersembahkan pada Ayahanda, Ibunda, dan Semua Pihak  
Yang Telah Memberikan Motivasi Dalam Penyelesaian Skripsi

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, kredit modal terhadap tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*) dan dummy wilayah. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat variasi kondisi kemiskinan 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dan kredit modal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik ( $\alpha = 5$  persen) terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pendidikan rendah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik ( $\alpha = 5$  persen) terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesakitan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

**Kata Kunci : Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, kredit modal, dan data panel**

4. Hastarini Dwi Atmati, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menjalani pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Dr. Nugroho SBM, MSP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman satu angkatan IESP 2010, Abdil Haq Fasolatain, Margareta Damanik, Ferry Rahmadhani, Cintami Rahmawati, Rini Asmita Samosir, Pradipta Eka, Diniar Rahmawati, Muhammad Lukman, Ika Dita Septiana, Hendi Adi Saputra, Rahmat Andi Yulianto, Wahyu Anisa Miftofani, Janwar Hardi Halim, Eko Suryanto, Asri Prastiko Wibowo, Rizki Yanuar Pratiwi, Aris Caesar Kurnia Jaya, Irawan Ari Kusuma, Yohanes Adeo, Dewi Utami Setyaningrum, Vivi Cristovani, Novia Hesti Aryuna, Ayu Triani Utami, Gerry Bramesta Anas. Eka Nur Supiati, Yohan Maladzi Putra, Jarot Setya Ridha Tama, Herlan Baskoro, Nasuha Zen, Bayu Aji Prakoso, Fauzani Zamzami, Hanggoro Setya Prayogo, Alfian Wahyu Fauzan, Veby Reza Pradana, Indra Permana, Erfan Satrio Nugroho, Taufiq Catur Priambodo, Uray Muhammad Taufan, Saut Parluhutan Hutahaeon,

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Kemiskinan.....	15
2.1.1.1 Definisi Kemiskinan.....	15
2.1.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan.....	16
2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan.....	18
2.1.1.4 Ukuran Pendapatan Kemiskinan.....	21
2.1.1.5 Indikator Kemiskinan.....	21
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.1.2.1 Pengaruh pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.....	31
2.1.3 Pendidikan.....	32
2.1.3.1 Pendidikan Rendah.....	34
2.1.3.2 Pengaruh Pendidikan Rendah Terhadap Kemiskinan.....	35
2.1.3.3 Pendidikan Tinggi.....	36
2.1.3.4 Pengaruh Pendidikan Tinggi Terhadap Kemiskinan.....	36

<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	97
5.3 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1976-2012.....	2
Gambar 1.2 Persebaran Penduduk Miskin Menurut Pulau Di Indonesia Tahun 2012.....	4
Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	6
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse.....	20
Gambar 2.2 Hubungan Antara Pembangunan Kesehatan Dan Kemiskinan.....	38
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1 (35) Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.....	66
Gambar 4.2 Rata-Rata Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Jenjang SD Ke bawah dan SLTP Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Jiwa).....	73
Gambar 4.3 Rata-Rata Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Jenjang SLTA+ Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Jiwa).....	75
Gambar 4.4 Rata-Rata Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah Atas Penggunaan Modal Kerja Di 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	79
Gambar 4.5 Hasil Uji <i>Jarquea-Bera</i> Model Kemiskinan.....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan pernyataan dan komitmen perserikatan bangsa-bangsa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deklarasi tersebut tertuang ke dalam 8 butir tujuan yang dicapai pada tahun 2015, meliputi (1) mengentaskan kemiskinan dan kelaparan absolut, (2) mencapai pendidikan dasar secara universal, (3) meningkatkan dukungan persamaan gender dan pemberdayaan wanita, (4) menurunkan tingkat mortalitas anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) menurunkan persebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya, (7) meningkatkan keberlangsungan lingkungan, (8) mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012).

Tujuan utama MDGs adalah komitmen mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (Todaro, 2006). Kemiskinan dapat muncul ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan dalam definisi yang luas kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beranekaragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi, miskin terhadap asset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup, miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber

Pada masa orde baru, langkah utama pemerintah dalam memperbaiki stabilitas fundamental makroekonomi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan (Zain, 2010). Terlihat pada Gambar 1.1 tingkat kemiskinan mengalami penurunan secara dramatis, yaitu pada tahun 1976 sebesar 40,10 persen menjadi 11,30 persen di tahun 1996. Namun, akibat krisis ekonomi tingkat kemiskinan mulai merangkak naik hingga menyentuh angka 24,20 persen di tahun 1998. Menurut Kemal Stamboel (2009) menyatakan bahwa krisis ekonomi 1997/1998 memberikan pesan penting bahwa stabilitas makroekonomi memang dibutuhkan tapi tidak cukup (*it's a necessary but not suffiecient*), sehingga diperlukan adanya sebuah sistem Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari guncangan ekonomi.

Setelah masa krisis dilalui dan pemerintah mulai menerapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS), tingkat kemiskinan mulai berangsur-angsur turun hingga tahun 2005 menyentuh angka 15,97 persen. Akan tetapi, tingkat kemiskinan mulai menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2006 yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi (Tim Indonesia Bangkit, 2006), sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan sebesar 17,75 persen. Dengan semakin gencarnya pemerintah merefleksikan program-program pengentasan kemiskinan diantaranya yaitu, program jaminan kesehatan masyarakat, program bantuan operasional sekolah, program kredit usaha rakyat (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2014), maka tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan secara berangsur-angsur hingga di tahun 2012 yang bertengger pada posisi 11,67 persen.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Di Pulau Jawa**  
**Tahun 2008 – 2012**

Provinsi	Tingkat Kemiskinan					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
DKI Jakarta	4,29	3,62	3,48	3,75	3,69	3,76
Jawa Barat	13,01	11,96	11,27	10,65	10,09	11,39
<b>Jawa Tengah</b>	<b>19,23</b>	<b>17,72</b>	<b>16,56</b>	<b>15,76</b>	<b>15,34</b>	<b>16,92</b>
DI Yogyakarta	18,32	17,23	16,83	16,08	16,05	16,90
Jawa Timur	18,51	16,68	15,26	14,23	13,40	15,62
Banten	8,15	7,64	7,16	6,32	5,85	7,02

*Sumber : BPS Statististik Nasional berbagai tahun*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2008 hingga 2012 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan secara berangsur-angsur yaitu sebesar 19,23 persen di tahun 2008 menjadi 15,34 persen di tahun 2012. Meski demikian tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong *hard core* (>10 persen), yang mengindikasikan belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan serangkaian kebijakan guna mengentaskan kemiskinan. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu diketahui faktor-faktor yang berkontribusi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi seringkali digadang-gadang merupakan faktor yang dibutuhkan guna mereduksi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Pernyataan ini turut didukung dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya oleh Sumarto (dalam Kuncoro, 2006) yang menyatakan bahwa adanya suatu relasi negatif (*trade-off*) yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang**  
**Ditamatkan Di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012**

Tahun	SD ke bawah (Jiwa)	SLTP (Jiwa)	SLTA + (Jiwa)
2008	9 367 374	2 798 160	3 298 124
2009	9 457 640	2 893 843	3 483 899
2010	9 173 558	2 993 593	3 642 296
2011	9 135 874	3 048 208	3 732 053
2012	9 013 849	3 061 738	4 057 303

*Sumber :BPS Jawa Tengah berbagai tahun*

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk kerja di Jawa Tengah didominasi pendidikan terakhir SD ke bawah. Selama kurun waktu 2008 hingga 2012 jumlah kumulatif penduduk kerja tamatan SD ke bawah dan SLTP mengalami fluktuasi dengan proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah cenderung mengalami penurunan yaitu sebanyak 9.367.374 jiwa di tahun 2008 menjadi 9.013.849 jiwa di tahun 2012, sedangkan tenaga kerja tamatan SLTP mengalami peningkatan, jika ditahun 2008 sebanyak 2.798.160 jiwa maka pada tahun 2012 sebanyak 3.061.738 jiwa. Di lain pihak, jumlah penduduk kerja tamatan pendidikan SLTA ke atas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 4.057.303 jiwa di tahun 2012, dari yang semula 3.298.124 jiwa di tahun 2008.

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2008 sampai 2012, jumlah kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas penggunaan modal kerja mengalami peningkatan, yaitu sebesar 28.738.234 juta rupiah di tahun 2008, menjadi 43.668.152 juta rupiah di tahun 2012.

**Tabel 1.4**  
**Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Atas Penggunaan Modal Kerja**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012**

Tahun	Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Atas Penggunaan Modal Kerja (Juta Rupiah)
2008	28.738.234
2009	31.179.408
2010	35.893.711
2011	37.305.817
2012	43.668.152

*Sumber : Bank Indonesia Wilayah V (Jawa Tengah) berbagai tahun*

Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kredit modal terhadap kemiskinan, antara lain yaitu penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, serta variabel pendidikan berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dicky Wahyudi (2013) menghasilkan penelitian bahwa variabel pendidikan serta kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Modal manusia merupakan komponen penting bagi seseorang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan seiring meningkatnya pendidikan dan kesehatan. Selama beberapa tahun terakhir di Jawa Tengah, jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir SD ke bawah dan SLTP mengalami fluktuatif, namun di lain pihak penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir SLTA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di samping itu, derajat kesehatan menunjukkan ke arah yang positif yang dicerminkan dengan semakin menurunnya angka kesakitan selama beberapa tahun terakhir.

Kredit modal diyakini merupakan cara efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Selama beberapa tahun terakhir kredit UMKM atas penggunaan modal kerja di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan rendah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan tinggi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kesakitan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh kredit modal terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah wawasan para pembaca dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan para pengambil kebijakan guna mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, serta kredit modal di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Selain itu bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan landasan teori tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, kesehatan, kesakitan, kredit, dan modal. Di samping itu, pada bab ini juga tertera penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini dipaparkan literatur yang meliputi beberapa teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.

#### **2.1 Landasan Teori**

Di dalam landasan teori akan dikupas beberapa teori yang relevan dengan penelitian yaitu, teori kemiskinan, teori pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, teori pendidikan, teori pendidikan rendah dan pengaruh pendidikan rendah terhadap kemiskinan, teori pendidikan tinggi dan pengaruh pendidikan tinggi terhadap kemiskinan, teori kesehatan, teori kesakitan dan pengaruh kesakitan terhadap kemiskinan, teori kredit, teori modal serta pengaruh kredit modal terhadap kemiskinan.

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar minimum (Kuncoro, 2006). Hal senada turut diutarakan Todaro (2006) yang mengemukakan bahwa cakupan kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya guna mempermudah gambaran mengenai hak-hak dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, maka Bappenas (dalam Setiawan, 2011)



2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD, 2011) menggolongkan kemiskinan ke dalam 3 derajat yang berbeda :
  - a. *Potential Poverty*, yaitu seseorang yang memiliki pendapatan berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga sedikit guncangan eksternal akan menyebabkan masuk ke dalam situasi kemiskinan yang lebih buruk.
  - b. *Transient Poverty*, adalah kemiskinan yang terjadi hanya untuk waktu yang relatif sementara akibat kondisi eksternal tertentu, dan dimungkinkan dapat dengan mudah terbebas dari situasi miskin jika kondisi berubah ke arah yang lebih positif.
  - c. *Chronis Poverty*, kemiskinan yang berlangsung secara terus menerus atau lebih bersifat permanen akibat kultur kemiskinan (*fatalisme*) atau tempat tinggal yang tidak menguntungkan serta kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin atau daerah tertinggal.
3. Menurut Chriswardani Suryawati (2005), kemiskinan berdasarkan sifatnya di bagi menjadi 2 :
  - a. *Natural Poverty*, adalah kemiskinan yang berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
  - b. *Artifical Poverty*, merupakan kemiskinan yang lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang

- a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
  - b. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
  - c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
  - d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
  - e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
  - f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
  - g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
  - h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
  - i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
3. Kemudian Sharp, *et al* (dalam Kuncoro, 2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi :
- a. secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
  - b. kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2006)

#### **2.1.1.4 Ukuran Pendapatan Kemiskinan**

Menurut Arsyad (1997) secara umum kemiskinan dapat dilihat dari 2 ukuran pendapatan :

1. Kemiskinan Absolut adalah seseorang yang memiliki pendapatan, namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan minimum agar hidup secara layak. Kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.
2. Kemiskinan Relatif adalah seseorang yang mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Sehingga kemiskinan relatif bersifat dinamis dan kemiskinan akan selalu ada.

#### **2.1.1.5 Indikator Kemiskinan**

*World Bank* membuat garis kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*Purchasing Power Parity*/ paritas daya beli) per hari.

- $= 0$ , maka diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- $= 1$ , maka diperoleh *Poverty Gap Index* ( $P_1$ ), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- $= 2$ , maka diperoleh *Poverty Severity* ( $P_2$ ), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selain itu, terdapat beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia antara lain yaitu,

1. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat kemiskinan dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang

3. Menurut Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ukuran kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang terbagi menjadi 5 tahap (Soleh, 2009) :

- a. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), apabila belum mampu memenuhi salah satu indikator yang ditetapkan BKKBN.
- b. Keluarga Sejahtera I (miskin), apabila baru mampu memenuhi indikator 1 s.d 6 ketentuan BKKBN.
- c. Keluarga Sejahtera II, apabila baru mampu memenuhi indikator 1 s.d 14 ketentuan BKKBN.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III, apabila baru mampu memenuhi indikator 1 s.d 19 ketentuan BKKBN.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, apabila sudah mampu memenuhi indikator keseluruhan (1 s.d 21) ketentuan BKKBN.

Indikator- indikator ketentuan BKKBN :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik,
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan,
5. Bila pasangan subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;

18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ tv;
20. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, *institusional* (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznets dalam Todaro, 2006). Selanjutnya diikuti Sukirno (2011) yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal (*capital accumulation*), termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja. Akumulasi modal dapat diperoleh apabila sebagian pendapatan yang diterima saat ini dan dialokasikan untuk

butuhkan, hal ini mengingat masih tingginya angka pengangguran di negara berkembang (Todaro, 2006).

Menurut Nugraheni, pengukuran kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain (Prasetyo, 2010) :

- a. Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat nasional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang bersifat global, dan bukan merupakan tolok ukur pertumbuhan ekonomi secara tepat, karena belum mampu mencerminkan kesejahteraan tiap penduduknya. Selanjutnya, guna mengetahui dinamika laju PDB atau PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang terjadi tiap satu waktu tertentu (satu tahun), maka dapat dihitung dengan rumus :

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100 \quad (2.2)$$

Keterangan :

$G_t$  = Pertumbuhan PDB / PDRB dalam satuan persen

$Y_t$  = PDB / PDRB pada tahun t

$Y_{t-1}$  = PDB/PDRB pada tahun t – 1

- b. Produk Domestik Bruto Per kapita atau di tingkat nasional Produk Domestik Regional Bruto Per kapita merupakan skala daerah yang digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih

- c) Menggunakan pendekatan pendapatan, dengan pendekatan ini pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian kewirausahaan) yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional (Sukirno,2011).

### **2.1.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Mengacu pada teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa, berawal dari pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan maka berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja atau peningkatan upah, dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Tambunan, 2011).

Selain itu, terdapat pula beberapa empiris yang membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, antara lain :

1. Wongdemiswati (2009) yang menunjukkan penelitian bahwa semakin impresif pertumbuhan ekonomi maka berdampak pada mereduksinya tingkat kemiskinan yang ada.
2. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) yang menghasilkan penelitian bahwa adanya *trade-off* yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin.
3. Sumarto (dalam Kuncoro, 2006) yang menghasilkan penelitian bahwa terdapat hubungan yang negatif sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi.



- b) Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau berbentuk lain yang sederajat.
  - c) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang merupakan program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

pertanian guna menunjang pembangunan desa, maka Philip H.Coombs (dalam Suryana, 2000) membagi tipologi pendidikan yang sesuai untuk negara berkembang antara lain :

- 1) Pendidikan umum atau pendidikan dasar, baca tulis, hitung dan pengetahuan elementer tentang sains dan lingkungan hidup yang oleh kebanyakan sekolah dasar dan menengah yang ingin dicapai.
- 2) Pendidikan kesejahteraan keluarga dimaksudkan terutama untuk mendalami pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga, termasuk kesehatan dan nutrisi, rumah sehat dan perawatan anak, membangun rumah dan perbaikannya, keluarga berencana dan yang serupa.
- 3) Pendidikan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik lokal maupun nasional, koperasi, proyek-proyek kemasyarakatan dan yang serupa.
- 4) Pendidikan ketrampilan kerja, dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan khusus yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan yang bermanfaat bagi usaha membina kehidupan.

### **2.1.3.2 Pengaruh Pendidikan Rendah Terhadap Kemiskinan**

Menurut Ansel M. Sharp, salah satu penyebab kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan rendah berimplikasi pada produktivitas yang rendah, sehingga diikuti pula rendahnya pendapatan yang diperoleh (Setiawan,2011).

#### **2.1.4 Kesehatan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya Santoso (2006) mengungkapkan bahwa kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan di mana tidak dialami penyakit yang bersifat kronis yang cenderung meluas dan di mana cacat tubuh maupun cacat jiwa hanya diderita dalam kalangan terbatas.

Todaro (2006) mengemukakan 3 alasan penting peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan :

1. Kesehatan merupakan hal yang sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kali kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan.
2. Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mereka mengabaikan eksternalitas (seperti masalah penularan penyakit).
3. Pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan, dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, karena kegagalan pasar.

##### **2.1.4.1 Kesakitan**

Kesakitan dapat diartikan sebagai keluhan kesehatan yang dialami seseorang hingga terganggu aktifitasnya sehari-hari. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (BPS, 2013)

## 2.1.5 Kredit Modal

### 2.1.5.1 Kredit

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit kepada debitur dapat terlaksana apabila debitur memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu (Sanusi, 2011),

1. *Character*, merupakan gambaran kepribadian dari calon debitur yang dilihat dari sifat, kebiasaan, cara hidup, keadaan latar belakang keluarga maupun hobinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.
2. *Capacity*, merupakan penilaian calon debitur mengenai kemampuannya melunasi kewajiban pembayaran kredit, yang dapat diukur melalui pengalaman mengelola usaha serta sejarah perusahaan yang pernah dikelola.
3. *Capital*, merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola debitur, yang mana dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan serta ratio keuntungan.

- b. Kredit Investasi (KI), merupakan kredit berjangka menengah atau panjang, yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang guna kegiatan usaha nasabah.
- c. Kredit Konsumsi, merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

#### **2.1.5.2 Modal**

Menurut kamus bahasa Indonesia modal merupakan uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Modal adalah seluruh asset yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan output guna memperoleh pendapatan Selanjutnya, macam - macam modal yaitu (Yusuf, 2010) :

1. Modal menurut pemilikinya
  - a. Modal perseorangan, artinya modal tersebut dimiliki orang perseorangan
  - b. Modal masyarakat, artinya modal tersebut dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak
2. Modal menurut wujudnya
  - a. Konkret, artinya modal yang jelas wujudnya serta dapat dilihat
  - b. Abstrak, artinya modal yang tidak terlihat namun dapat dirasakan kegunaannya
3. Modal menurut bentuknya

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kredit modal, serta kemiskinan yang diteliti dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

1. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dalam jurnal "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel. Model yang digunakan adalah  $POVERTY = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 POPULASI + \beta_3 AGRISHARE + \beta_4 INDUSTRISHARE + \beta_5 INFLASI + \beta_6 SMP + \beta_7 SMA + \beta_8 DIPLM + \beta_9 DUMMYKRISIS + \epsilon$ , dimana POVERTY adalah jumlah penduduk miskin yang diduga dipengaruhi oleh pendapatan (PDRB), jumlah populasi penduduk (POPULASI), pangsa sektor pertanian dalam PDRB (AGRISHARE), pangsa sektor industri manufaktur dalam PDRB (INDUSTRISHARE), tingkat inflasi (INFLASI), jumlah lulusan sekolah setingkat SMP (SMP), jumlah lulusan sekolah setingkat SMA (SMA), jumlah lulusan sekolah setingkat diploma (DIPLM), dan dummy krisis ekonomi (DUMMY KRISIS). Hasil penelitian ini adalah PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh tersebut relatif tidak besar. Variabel inflasi dan populasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun berpengaruh relatif kecil. Variabel Share sektor pertanian dan share sektor industri berpengaruh signifikan mengurangi jumlah kemiskinan. Variabel yang signifikan dan relatif

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih dan besar pengaruhnya sebesar 82,4 persen.

Selanjutnya ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Variabel Dependen/ Independen	Hasil Penelitian
1	'Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin'' oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)	Variabel dependen: kemiskinan  Variabel independen: PDRB, share sektor pertanian, share sektor industri, pendidikan	Berdasarkan hasil penelitian seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
2	''Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah'' oleh Dicky Wahyudi (2013)	Variabel dependen: kemiskinan  Variabel independen: pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah, pengangguran, pertumbuhan ekonomi	Pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah, serta pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
3	''Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal'' oleh Inayah, dkk (2014)	Variabel dependen : kredit modal kerja  Variabel independen: pendapatan bersih	Berdasarkan hasil penelitian kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dikarenakan tingkat pendidikan rendah, maka berdampak pada tingkat produktivitas yang rendah, dan pada gilirannya pendapatan yang diperoleh turut rendah (M. Sharp Et. Al dalam Setiawan, 2011). Sedangkan melalui investasi tingkat pendidikan yang tinggi, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dari tingkat produktivitas yang tinggi, dan pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan yang lebih baik (Rasidin, 2010).

Kondisi kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang berakibat negatif terhadap produktivitas orang dewasa, yang ditunjukkan bahwa orang-orang yang sehat menerima upah yang lebih tinggi (Todaro, 2006). Selanjutnya, Nurkse menambahkan pula bahwa, kesehatan yang semakin buruk akan mengakibatkan lemahnya fisik yang selanjutnya menurunkan kapasitas kerjanya. Akibatnya penghasilan yang diperoleh turut rendah (Jhingan, 1983).

Selanjutnya, kemiskinan berawal dari kurangnya modal yang dapat diakses untuk kegiatan usaha. Akibatnya produktivitas rendah dan berimplikasi pada rendahnya pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu salah satu langkah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal (Setiawan, 2011). Selanjutnya hal yang senada turut diutarakan Yunus (dalam Todaro, 2006) yang mengatakan bahwa lemahnya akses untuk mendapatkan kredit bagi sebagian masyarakat miskin adalah salah satu penghambat utama kemajuan ekonomi mereka.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat 2 tipe variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau di jelaskan oleh variabel independen (bebas). Sedangkan variabel independen dijelaskan sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan terhadap variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (KMS), sedangkan yang dipilih menjadi variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi (PEK), pendidikan rendah (PDR), pendidikan tinggi (PDT), tingkat kesakitan (KST), serta kredit modal (KDM). Selanjutnya akan dipaparkan definisi dan indikator tiap variabel dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan (KMS), merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi (PEK), dinyatakan dalam laju Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan persen.

Selanjutnya akan dipaparkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Jawa Tengah tahun 2012.
2. Data pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tahun 2008 hingga 2012.
3. Data jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir jenjang SD ke bawah dan SLTP tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2009 hingga 2013.
4. Data jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir jenjang SLTA ke atas tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2009 hingga 2013.
5. Data tingkat kesakitan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Jawa Tengah 2012.
6. Data kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atas penggunaan modal kerja tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Bank

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya observasi

N x T = Banyaknya data panel

Menurut Wibisono (dalam Shocrul dan Rahmat, 2011) pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan :

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Data panel menghasilkan hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dalam analisis model data panel, terdapat dua macam pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut (Wahyudi, 2013) :

- a. Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model* (FEM)
- b. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
- c. Apabila komponen *error*  $\epsilon_i$  individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
- d. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

### 3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, kesehatan, kredit modal terhadap tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data *time series* selama periode tahun 2008 sampai 2012 dan data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi data *time series* dan *cross section* menghasilkan 175 observasi. Fungsi persamaan model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut :

- c. Koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi untuk setiap individu dan waktu.
- d. Semua koefisien (baik intersep maupun koefisien slope) bervariasi untuk setiap individu.
- e. Intersep dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu.

Berdasarkan asumsi ke 2 yang diutarakan Gujarati tentang koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu, maka menguatkan peneliti dalam menganalisis tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi (kasus : 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012) untuk menggunakan pendekatan *Fixed Effect*. Penelitian ini mengasumsikan intersep tiap individu (kabupaten/kota) memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep tiap individu. Oleh karena itu, persamaan dalam penelitian ini sering disebut dengan istilah *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Berkaitan dengan penggunaan persamaan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV), maka penelitian ini membutuhkan satu wilayah yang menjadi wilayah acuan (*benchmark*). Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan kota Semarang menjadi wilayah acuan yang dikarenakan memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah dibandingkan wilayah (kabupaten/kota) lain di Jawa Tengah. Maka model persamaan dengan *Least Square Dummy Variabel* dapat ditulis sebagai berikut:

- D<sub>10</sub> = Dummy Kabupaten Kebumen
- D<sub>11</sub> = Dummy Kabupaten Sukoharjo
- D<sub>12</sub> = Dummy Kabupaten Wonogiri
- D<sub>13</sub> = Dummy Kabupaten Karanganyar
- D<sub>14</sub> = Dummy Kabupaten Kudus
- D<sub>15</sub> = Dummy Kabupaten Grobogan
- D<sub>16</sub> = Dummy Kabupaten Blora
- D<sub>17</sub> = Dummy Kabupaten Temanggung
- D<sub>18</sub> = Dummy Kabupaten Pati
- D<sub>19</sub> = Dummy Kabupaten Klaten
- D<sub>20</sub> = Dummy Kabupaten Pemasang
- D<sub>21</sub> = Dummy Kabupaten Demak
- D<sub>22</sub> = Dummy Kabupaten Semarang
- D<sub>23</sub> = Dummy Kabupaten Rembang
- D<sub>24</sub> = Dummy Kabupaten Jepara
- D<sub>25</sub> = Dummy Kabupaten Tegal
- D<sub>26</sub> = Dummy Kabupaten Batang
- D<sub>27</sub> = Dummy Kabupaten Pekalongan
- D<sub>28</sub> = Dummy Kabupaten Brebes
- D<sub>29</sub> = Dummy Kabupaten Kendal
- D<sub>30</sub> = Dummy Kota Salatiga
- D<sub>31</sub> = Dummy Kota Magelang
- D<sub>32</sub> = Dummy Kota Surakarta

Penelitian ini dalam mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas, dilakukan dengan cara menganalisis menggunakan matrik korelasi tiap variabel bebas. Apabila ditemukan korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka model kemiskinan terkena penyakit multikolinearitas.

#### **b. Deteksi Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2005), deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t - 1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Breusch-Godfrey*, yaitu membandingkan nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *Breusch-Godfrey* dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *Breusch-Godfrey* lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit autokorelasi.

#### **c. Deteksi Heteroskedastisitas.**

Menurut Ghozali (2005) deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *White*, yaitu membandingkan nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *White* dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*)

mendekati satu mengartikan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted* ( $R^2$ ), dikarenakan nilai *Adjusted* ( $R^2$ ) telah disesuaikan dengan banyaknya df (*degree of freedom*). Sehingga lebih tepat dan sesuai dengan model penelitian ini, mengingat penggunaan data panel yang mengakibatkan df menjadi besar.

#### **b) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini guna menguji pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai t statistik dengan nilai t tabel dengan penggunaan ( $\alpha = 5$  persen). Sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

1.  $H_0 : \beta_1 = 0$ , tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta_1 > 0$ , terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara statistik variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat kemiskinan.

2.  $H_0 : \beta_2 = 0$ , tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pendidikan rendah terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta_2 > 0$ , terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik variabel pendidikan rendah terhadap variabel tingkat kemiskinan.



1. Apabila  $F \text{ statistik} > F \text{ tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
2. Apabila  $F \text{ statistik} < F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 4.1.1 Keadaan Geografis

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang letaknya diapit oleh dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis Jawa Tengah terletak antara  $5^{\circ} 40'$  dan  $8^{\circ} 30'$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ} 30'$  dan  $111^{\circ} - 30'$  Bujur Timur (termasuk kepulauan Karimunjawa).

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04 persen dari luas Pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia. Sedangkan pembagian penggunaan lahan berdasarkan penggunaan lahan sawah dan bukan lahan sawah, diketahui pada tahun 2010 terdapat lahan sawah sebesar 991.524 Ha atau (30,47 persen) dan luas bukan lahan sawah sebesar 2.262.888 Ha atau 69,53 persen. Selanjutnya, jarak terjauh Provinsi Jawa Tengah dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan adalah 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Ditinjau dari total penduduk, pada tahun 2012 terdapat 32.180.687 jiwa yang mendiami provinsi Jawa Tengah atau dengan kepadatan  $930/\text{km}^2$  (2,400/sq mi). Secara administratif provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, meliputi 573 kecamatan, 7.809 desa, dan 769 kelurahan. Disamping itu Provinsi Jawa Tengah berbatasan oleh :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia
Sebelah Barat	: Provinsi Jawa Barat
Sebelah Timur	: Provinsi Jawa Timur

**Tabel 4.2**  
**Tingkat kemiskinan Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 - 2012 (Persen)**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	21,40	19,88	18,11	17,15	15,92	18,49
2	Kab. Banyumas	22,93	21,52	20,20	21,11	19,44	21,04
3	Kab. Purbalingga	27,12	24,97	24,58	23,06	21,19	24,18
4	Kab. Banjarnegara	23,34	21,36	19,17	20,38	18,87	20,62
5	Kab. Kebumen	27,87	25,73	22,70	24,06	22,40	24,55
6	Kab. Purworejo	18,22	17,02	16,61	17,51	16,32	17,14
7	Kab. Wonosobo	27,72	25,91	23,15	24,21	22,50	24,70
8	Kab. Magelang	16,49	15,19	14,14	15,18	13,97	14,99
9	Kab. Boyolali	17,08	15,96	13,72	14,97	13,88	15,12
10	Kab. Klaten	21,72	19,68	17,47	17,95	16,71	18,71
11	Kab. Sukoharjo	12,13	11,51	10,94	11,13	10,16	11,17
12	Kab. Wonogiri	20,71	19,08	15,67	15,74	14,67	17,17
13	Kab. Karanganyar	15,68	14,73	13,98	15,29	14,07	14,75
14	Kab. Sragen	20,83	19,70	17,49	17,95	16,72	18,54
15	Kab. Grobogan	19,84	18,68	17,86	17,38	16,14	17,98
16	Kab. Blora	18,79	17,70	16,27	16,24	15,11	16,82
17	Kab. Rembang	27,21	25,86	23,40	23,71	21,88	24,41
18	Kab. Pati	17,90	15,92	14,48	14,69	13,61	15,32
19	Kab. Kudus	12,58	10,80	9,01	9,45	8,63	10,09
20	Kab. Jepara	11,05	9,60	10,18	10,32	9,38	10,11
21	Kab. Demak	21,24	19,70	18,76	18,21	16,73	18,93
22	Kab. Semarang	11,37	10,66	10,50	10,30	9,40	10,45
23	Kab. Temanggung	16,39	15,05	13,46	13,38	12,32	14,12
24	Kab. Kendal	17,87	16,02	14,47	14,26	13,17	15,16
25	Kab. Batang	18,08	16,61	14,67	13,47	12,40	15,05
26	Kab. Pekalongan	19,52	17,93	16,29	15,00	13,86	16,52
27	Kab. Pemasang	23,92	22,17	19,96	20,68	19,28	21,20
28	Kab. Tegal	15,78	13,98	13,11	11,54	10,75	13,03
29	Kab. Brebes	25,98	24,39	23,01	22,72	21,12	23,44
30	Kota Magelang	11,16	10,11	10,51	11,06	10,31	10,63
31	Kota Surakarta	16,13	14,99	13,96	12,90	12,01	14,00
32	Kota Salatiga	8,7	7,82	8,28	7,80	7,11	7,90
33	Kota Semarang	6,00	4,84	5,12	5,68	5,13	5,35
34	Kota Pekalongan	10,29	8,56	9,36	10,04	9,47	9,54
35	Kota Tegal	11,28	9,88	10,62	10,81	10,04	10,53

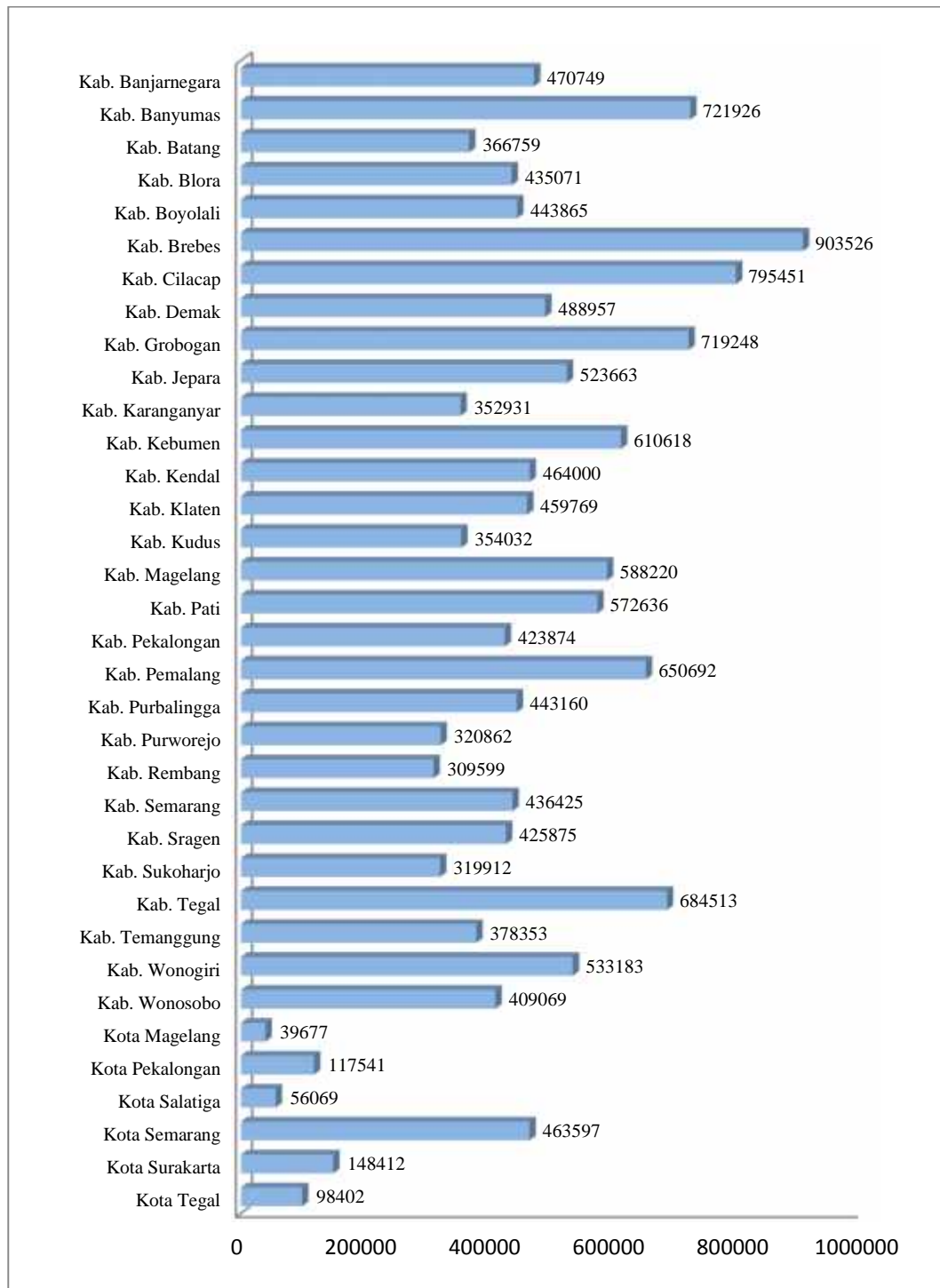
*Sumber :BPS Jawa Tengah berbagai tahun*

**Tabel 4.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 - 2012 (Persen)**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	4,92	5,25	5,65	5,78	5,59	5,44
2	Kab. Banyumas	5,38	5,49	5,77	5,95	5,88	5,69
3	Kab. Purbalingga	5,30	5,61	5,67	6,03	6,26	5,77
4	Kab. Banjarnegara	4,98	4,92	5,25	5,80	3,94	5,03
5	Kab. Kebumen	5,80	3,94	4,15	4,23	5,47	4,72
6	Kab. Purworejo	5,62	4,96	5,01	5,02	5,04	5,13
7	Kab. Wonosobo	3,69	3,85	4,29	4,52	5,14	4,30
8	Kab. Magelang	4,99	4,72	4,51	4,27	5,84	4,87
9	Kab. Boyolali	4,04	5,16	3,60	5,28	5,66	4,75
10	Kab. Klaten	3,93	4,24	1,73	1,96	5,54	3,48
11	Kab. Sukoharjo	4,84	4,76	4,65	4,59	5,03	4,77
12	Kab. Wonogiri	4,27	4,73	5,87	2,24	5,89	4,60
13	Kab. Karanganyar	5,30	3,59	5,42	5,50	5,82	5,13
14	Kab. Sragen	5,69	6,01	6,09	6,53	6,60	6,18
15	Kab. Grobogan	5,33	5,03	5,05	3,59	6,16	5,03
16	Kab. Blora	5,62	5,08	5,19	2,59	5,00	4,70
17	Kab. Rembang	4,67	4,46	4,45	4,40	4,88	4,57
18	Kab. Pati	4,94	4,69	5,11	5,43	5,92	5,22
19	Kab. Kudus	3,92	3,78	4,17	4,21	4,33	4,08
20	Kab. Jepara	4,49	5,02	4,52	5,44	5,79	5,05
21	Kab. Demak	4,11	4,08	4,12	4,48	4,64	4,29
22	Kab. Semarang	4,26	4,37	4,90	5,56	6,02	5,02
23	Kab. Temanggung	3,54	4,09	4,31	4,65	5,04	4,33
24	Kab. Kendal	4,26	4,10	5,97	5,99	5,54	5,17
25	Kab. Batang	3,67	3,72	4,97	5,26	5,02	4,53
26	Kab. Pekalongan	4,78	4,30	4,27	4,77	5,32	4,69
27	Kab. Pemalang	4,99	4,78	4,94	4,83	5,28	4,96
28	Kab. Tegal	5,32	5,49	4,83	4,81	5,25	5,14
29	Kab. Brebes	4,81	4,99	4,94	4,97	5,21	4,98
30	Kota Magelang	5,05	5,11	6,12	5,48	6,51	5,65
31	Kota Surakarta	5,69	5,90	5,94	6,04	6,12	5,94
32	Kota Salatiga	4,98	4,48	5,01	5,26	5,73	5,09
33	Kota Semarang	5,59	4,70	5,87	6,41	6,42	5,80
34	Kota Pekalongan	3,73	4,18	5,51	5,45	5,60	4,89
35	Kota Tegal	5,15	5,04	4,61	4,58	5,07	4,89

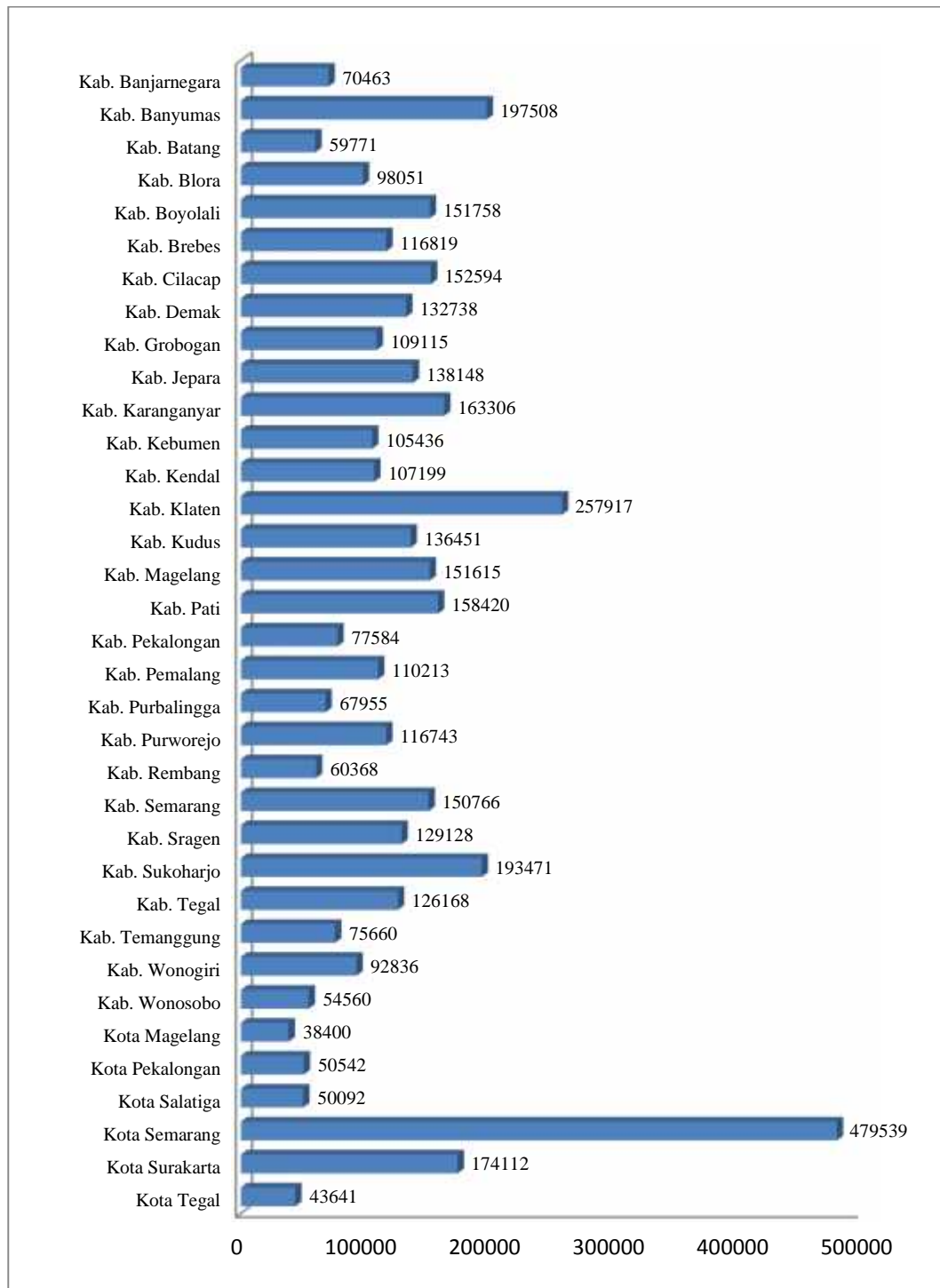
Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun

**Gambar 4.2**  
**Rata-Rata Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang**  
**Ditamatkan Jenjang SD Ke Bawah dan SLTP Di 35 Kabupaten/Kota**  
**Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Jiwa)**



*Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun*

**Gambar 4.3**  
**Rata-Rata Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang**  
**Ditamatkan Jenjang SLTA + Di 35 Kabupaten/Kota**  
**Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ( Jiwa )**



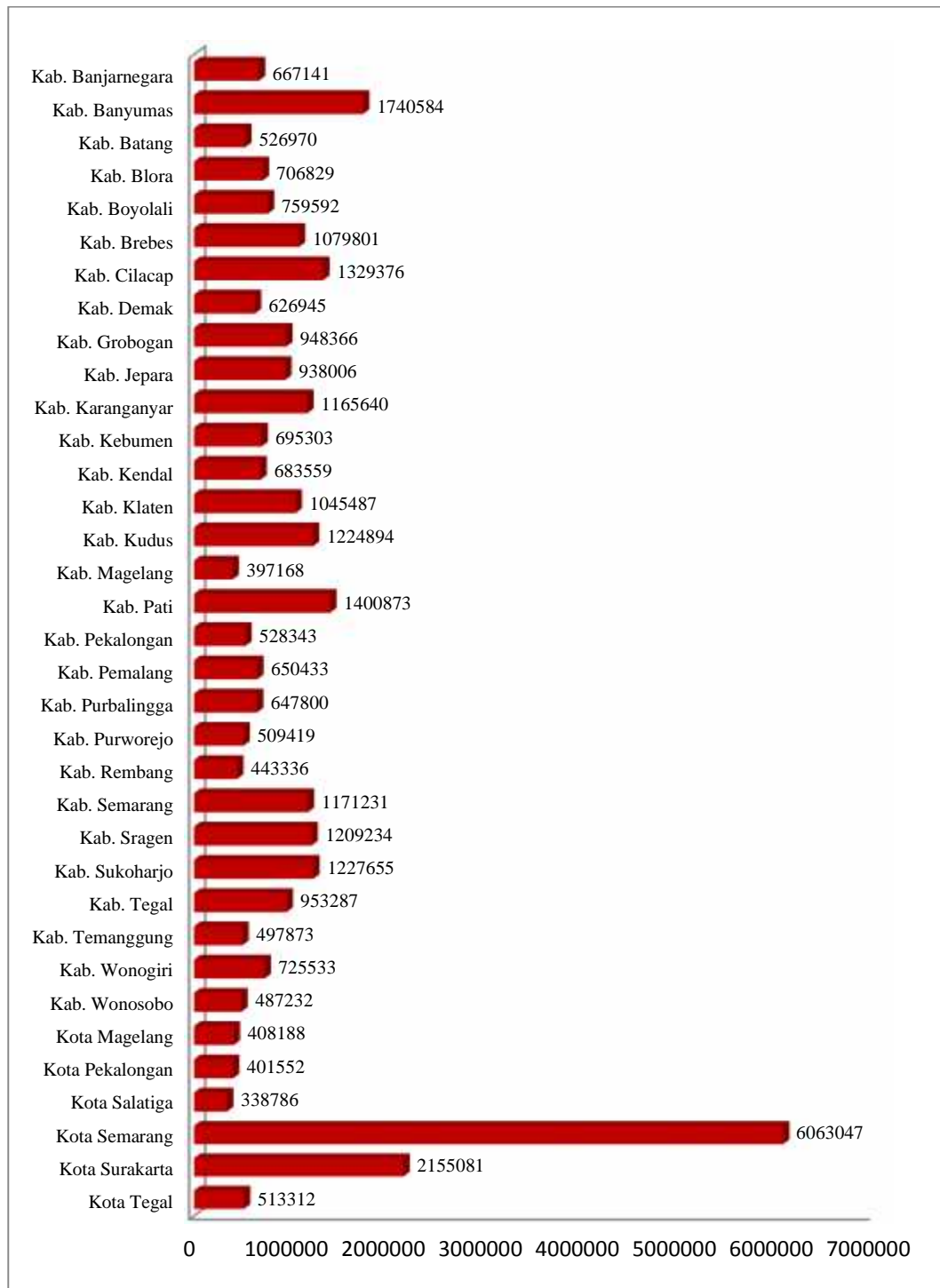
*Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun*

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Kesakitan Di 35 Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 - 2012 (Persen)**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	71,6	54,8	53,3	48,2	50,3	55,64
2	Kab. Banyumas	64,5	55	60,6	66,4	63,3	61,96
3	Kab. Purbalingga	57,6	56,7	60,1	59,9	60,6	58,98
4	Kab. Banjarnegara	57,8	57,4	51,9	52,1	50,9	54,02
5	Kab. Kebumen	62,1	50,5	45,9	44,8	51,8	51,02
6	Kab. Purworejo	46,7	38,7	44,9	39,4	39,1	41,76
7	Kab. Wonosobo	59,9	42,5	43,6	38,8	34,5	43,86
8	Kab. Magelang	62	46,8	56,4	52	48,2	53,08
9	Kab. Boyolali	51,1	48,9	49,9	50,9	49,2	50
10	Kab. Klaten	46,8	43,7	39,9	44,9	44,9	44,04
11	Kab. Sukoharjo	61,8	51,1	33,9	35,6	29	42,28
12	Kab. Wonogiri	51,1	45,3	54	43,8	44,5	47,74
13	Kab. Karanganyar	54,7	26,9	31,3	26,2	26,7	33,16
14	Kab. Sragen	45,9	53	43,1	42,6	36	44,12
15	Kab. Grobogan	54,6	51,8	45	39,3	37,8	45,7
16	Kab. Blora	69,2	64,5	64	56,8	54,2	61,74
17	Kab. Rembang	57,9	55,2	59,2	61,8	56,8	58,18
18	Kab. Pati	47,2	57,7	59,3	55,6	55,9	55,14
19	Kab. Kudus	56,4	54,5	54,4	48,4	47,4	52,22
20	Kab. Jepara	46,6	76,3	62	65,7	71,8	64,48
21	Kab. Demak	69,3	62,4	63,8	52,6	49,6	59,54
22	Kab. Semarang	49,6	42,2	44,8	44,5	43,1	44,84
23	Kab. Temanggung	66,4	41,8	35,7	37,1	33,6	42,92
24	Kab. Kendal	60,5	41,9	41,4	46,2	44	46,8
25	Kab. Batang	58,7	57,5	71,2	61,5	50,8	59,94
26	Kab. Pekalongan	45,9	72,9	58,4	61,7	57	59,18
27	Kab. Pemasang	73,6	48,3	58,3	41,7	41	52,58
28	Kab. Tegal	62	57,7	51,1	52,2	56,8	55,96
29	Kab. Brebes	67,4	43,3	41	46	39,9	47,52
30	Kota Magelang	59,3	60,9	40,3	42,2	40,3	48,6
31	Kota Surakarta	44,2	27	34,1	42	43,1	38,08
32	Kota Salatiga	68	44,7	49,3	42,9	43,5	49,68
33	Kota Semarang	66,2	51,7	58,6	41,3	45	52,56
34	Kota Pekalongan	76,9	48,9	65,3	37,5	44,3	54,58
35	Kota Tegal	70,8	54,8	57,4	52,2	39,7	54,98

Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun

**Gambar 4.4**  
**Rata-Rata Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah Atas Penggunaan Modal**  
**Kerja Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 - 2012 (Juta Rupiah)**



Sumber: Bank Indonesia (V) Jawa Tengah berbagai tahun



#### 4.2.2 Deteksi Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005), deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode sebelumnya ( $t - 1$ ). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi digunakan uji *Breusch-Godfrey*.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji *Breusch-Godfrey* (BG) Model Kemiskinan**

*Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :*

F-statistic	0,696163
Obs* R-squared	1,813029

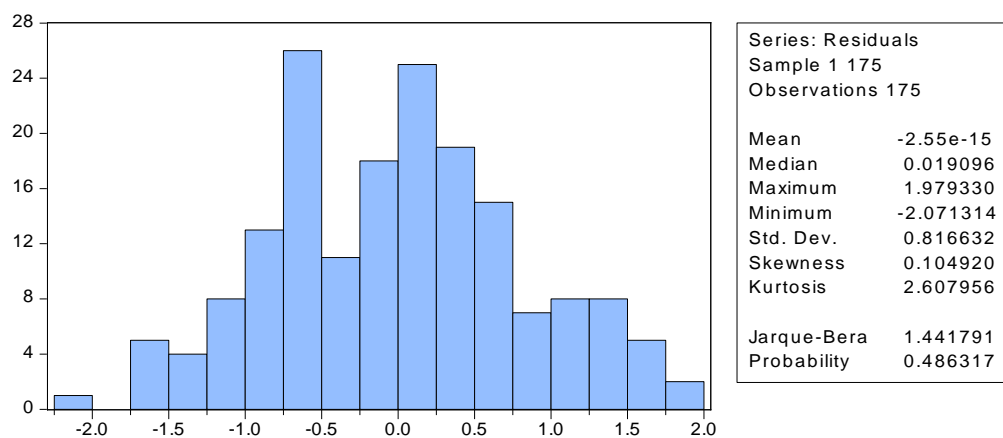
*Sumber : Lampiran C*

Tabel 4.6 memperlihatkan hasil uji *Breusch-Godfrey* pada model kemiskinan selama periode 5 tahun (2008-2012), yang menghasilkan  $n$  sebanyak 175 dan  $k$  sebanyak 40, sehingga diperoleh *degree of freedom* (df) yang diperoleh sebanyak 135 ( $n - k$ ). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan  $\alpha = 5$  persen (taraf keyakinan 95 persen) maka diperoleh nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel sebesar 124,342. Guna mendeteksi apakah dalam model kemiskinan ditemukan gejala autokorelasi, maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Obs\* R-squared* hasil uji *Breusch-Godfrey* yang diperoleh sebesar 1,813029 dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel yang didapati sebesar 124,342. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model kesemiskinan tersebut terbebas dari penyakit autokorelasi yang dikarenakan nilai *Obs\* R-squared* hasil uji *Breusch-Godfrey* lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel.

#### 4.7.4 Deteksi Normalitas

Menurut Ghozali (2005) deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Pada umumnya deteksi normalitas digunakan apabila jumlah observasi data kurang dari 30, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jumlah observasi sebanyak 175, sehingga menguatkan bahwa data terdistribusi secara normal. Namun demikian, untuk menguji secara akurat dan membuktikannya, maka dalam penelitian guna menguatkan data terdistribusi secara normal dengan cara menggunakan uji *Jarque-Bera*.

**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Jarque-bera Model Kemiskinan**



*Sumber : Lampiran C*

Pada model kemiskinan dengan penggunaan periode 5 tahun (2008-2012), diperoleh  $n$  sebanyak 175 dan  $k$  sebesar 40, sehingga *degree of freedom* ( $df$ ) didapati sebesar 135 ( $n-k$ ). Sehubungan dengan penggunaan  $\alpha = 5$  persen, sehingga nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel diperoleh sebesar 124,342. Guna mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan dengan cara

kemiskinan ini, digunakan  $\alpha = 5$  persen (taraf keyakinan 95 persen) dan nilai *degree of freedom* (df) = 135 yang diperoleh dari ( $n-k = 175 - 40$ ), maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,980. Sehingga berdasarkan hasil regresi utama pada model kemiskinan (lampiran B), dapat disimpulkan bahwa dengan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), variabel pertumbuhan ekonomi (PEK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan nilai t statistik sebesar  $1,610 <$  dibanding nilai t tabel sebesar 1,980, variabel pendidikan rendah (PDR) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan nilai t statistik sebesar  $9,199 >$  dibanding nilai t tabel sebesar 1,980, variabel pendidikan tinggi (PDT) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan nilai t statistik sebesar  $2,227 >$  dibanding nilai t tabel sebesar 1,980, variabel tingkat kesakitan (KST) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan disebabkan nilai t statistik sebesar  $0,810 <$  dibanding nilai t tabel sebesar 1,980, serta variabel kredit modal (KMD) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan nilai t statistik sebesar  $2,942 >$  dibanding nilai t tabel sebesar 1,980.

#### **4.3.3 Uji Signifikansi Simultan ( Uji F )**

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 1997). Pada model kemiskinan dengan yang menggunakan periode 5 tahun (2008-2012), maka diperoleh n sebanyak 175 dan k sebesar 40. Sehubungan dengan penggunaan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), maka *degree of freedom for numerator* (dfn) yang diperoleh sebesar  $= 39$  ( $k-1= 40 - 1$ ) dan *degree of freedom*

**Tabel 4.8**  
***Dummy Effect***

Kabupaten/Kota	<i>Dummy Effect</i>
Kota Semarang	14,64
Kab. Cilacap	15,85
Kab. Banyumas	19,91
Kab. Purbalingga	22,75
Kab. Banjarnegara	18,92
Kab. Kebumen	22,01
Kab. Purworejo	16,87
Kab. Wonosobo	23,04
Kab. Magelang	12,58
Kab. Boyolali	14,37
Kab. Klaten	18,85
Kab. Sukoharjo	12,45
Kab. Wonogiri	15,20
Kab. Karanganyar	15,59
Kab. Sragen	18,71
Kab. Grobogan	15,07
Kab. Blora	15,54
Kab. Rembang	23,46
Kab. Pati	14,55
Kab. Kudus	10,44
Kab. Jepara	8,80
Kab. Demak	17,31
Kab. Semarang	10,42
Kab. Temanggung	12,90
Kab. Kendal	13,90
Kab. Batang	13,74
Kab. Pekalongan	14,94
Kab. Pemalang	18,36
Kab. Tegal	10,47
Kab. Brebes	19,30
Kota Magelang	11,89
Kota Surakarta	18,05
Kota Salatiga	8,90
Kota Pekalongan	10,07
Kota Tegal	11,31

*Sumber : Lampiran B, diolah*

Berdasarkan penggunaan model *Fixed Effect*, maka cara membaca variabel tersebut adalah dengan mengurangi koefisien intersep regresi utama dengan nilai koefisien pada parameter *dummy* wilayah (Gujarati, dalam Wahyudi 2013).

## **4.5 Interpretasi Hasil Estimasi Model Kemiskinan**

Guna memudahkan memahami hasil estimasi model kemiskinan, maka selanjutnya akan disajikan interpretasi hasil pada model kemiskinan tersebut

### **4.5.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan**

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diyakini mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, serta kredit modal.

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi (PEK)**

Berdasarkan hasil estimasi pada model kemiskinan, diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PEK) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa, berawal dari pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan maka berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja atau peningkatan upah, dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Tambunan, 2011)

Ketidakterpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, diindikasikan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama 5 tahun terakhir tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata share sebesar > 30 persen ( 61.726.528 juta rupiah dari total PDRB sebesar 188.163.893 juta rupiah [RPJMD, 2013]), Hal ini mengingat sektor industri pengolahan lebih menekankan pada padat modal dan menuntut tenaga kerja memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, akibatnya efek pertumbuhan ekonomi hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat.

### 3. Pendidikan Tinggi (PDT)

Berdasarkan hasil regresi pada model kemiskinan, diperoleh variabel pendidikan tinggi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Apabila mengacu pada asumsi dasar teori *human capital*, seseorang dapat meningkatkan pendapatannya dengan seiring peningkatan tingkat pendidikan yang ia tempuh. Hal ini dikarenakan setiap tambahan satu tahun sekolah mampu meningkatkan kapasitas kerja dan berimplikasi pada meningkatnya penghasilan seseorang yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan orang tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan (Sitepu, 2010) yang menyatakan bahwa melalui investasi pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang yang selanjutnya akan mendorong produktivitas tenaga kerja seseorang. Sehingga perusahaan bersedia memberikan upah yang lebih tinggi dan pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Di samping itu hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Todaro (2006) yang menyatakan bahwa para pekerja yang menyelesaikan sekolah menengah dan universitas memperoleh pendapatan 300 persen hingga 800 persen lebih besar dibanding para pekerja yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau kurang dari itu. Hasil senada turut dihasilkan pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) yang mengukur pendidikan dengan jumlah lulusan SMA ke atas dan menghasilkan hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

## 5. Kredit Modal

Berdasarkan hasil estimasi pada model kemiskinan, diperoleh hasil bahwa variabel kredit modal (KMD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Melalui kredit, seseorang mampu mengeksplorasi dirinya untuk mengembangkan ketrampilannya atau keahliannya yang mereka miliki. Hal ini mengutip dari paparan Yunus yang menyatakan bahwa setiap orang pasti memiliki ketrampilan untuk melanjutkan hidup mereka, bukti mereka sampai saat ini masih hidup membuktikannya (Todaro, 2006). Sehingga dengan adanya pemberian kredit, mampu meningkatkan produktivitas bagi kaum miskin. Dengan seiring peningkatan produktivitas maka berimplikasi pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Hasil penelitian ini juga menguatkan pernyataan yang diutarakan Setiawan (2011) yang menekankan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan kredit modal. Ditambah pula relevan dengan pernyataan Yunus yang menegaskan bahwa lemahnya akses untuk mendapatkan kredit bagi sebagian masyarakat miskin adalah salah satu penghambat utama kemajuan ekonomi mereka (Todaro, 2006).

Di samping itu penelitian ini ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayah, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisak (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa semakin tinggi pinjaman modal maka semakin tinggi pengaruh terhadap pendapatan.

Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan serta Kota Tegal. Adanya perbedaan letak geografis, struktur ekonomi, serta keadaan sosial yang mengakibatkan tiap daerah memiliki kondisi kemiskinan yang berbeda-beda.

**Tabel 4.10**  
**Koefisien Variabel *Dummy***

Kabupaten/Kota	Koefisien <i>Dummy</i>
Kab. Cilacap	1,21
Kab. Banyumas	5,27
Kab. Purbalingga	8,11
Kab. Banjarnegara	4,28
Kab. Kebumen	7,37
Kab. Purworejo	2,23
Kab. Wonosobo	8,4
Kab. Magelang	-2,06
Kab. Boyolali	-0,27
Kab. Klaten	4,21
Kab. Sukoharjo	-2,19
Kab. Wonogiri	0,56
Kab. Karanganyar	0,95
Kab. Sragen	4,07
Kab. Grobogan	0,43
Kab. Blora	0,9
Kab. Rembang	8,82
Kab. Pati	-0,09
Kab. Kudus	-5,84
Kab. Jepara	-5,84
Kab. Demak	2,67
Kab. Semarang	-4,22
Kab. Temanggung	-1,74
Kab. Kendal	-0,74
Kab. Batang	-0,9
Kab. Pekalongan	0,3
Kab. Pemasang	3,72
Kab. Tegal	-4,17
Kab. Brebes	4,66
Kota Magelang	-2,75
Kota Surakarta	3,41
Kota Salatiga	-5,74
Kota Pekalongan	-4,57
Kota Tegal	-3,33

Sumber : Lampiran B



6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan secara statistik ( $\alpha = 5$  persen), serta diperoleh pula nilai *adjusted R<sup>2</sup>* cukup tinggi yaitu sebesar (96,85 persen).

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan sumber data yang digunakan BPS khususnya data penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir yang menggunakan sumber data dari SUSENAS di tahun 2008-2009 dan SAKERNAS pada tahun 2010-2012.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa pendapat guna menanggulangi masalah kemiskinan, antara lain yaitu :

1. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan, dibutuhkan intervensi pemerintah yang berpihak kepada kaum miskin seperti mengucurkan bantuan kepada usaha kecil di pedesaan ataupun melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi lahan pertanian.
2. Diperlukannya pendidikan nonformal yang memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan ketrampilan masyarakat sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang kreatif dan pada gilirannya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.
3. Wacana pemerintah untuk mengusung program wajib belajar 12 tahun merupakan salah tindakan efektif dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini mengingat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 1997. *Analisis Regresi*. Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Edisi ketiga*. Yogyakarta: STIE-YKPN
- Badan Pusat Statistik. *Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 2008-2012*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. *Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 1970-2013*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Jawa Tengah*. Jawa Tengah
- \_\_\_\_\_. *Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan*. Jawa Tengah
- \_\_\_\_\_. 2011. *Profil Kesehatan Jawa Tengah*. Jawa Tengah
- \_\_\_\_\_. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Berbagai Tahun Terbitan*. Jawa Tengah
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011*. Republik Indonesia
- Bank Indonesia. 2012. *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah Berbagai tahun*. Jawa Tengah
- Bapeda. 2013. *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*. Jawa Tengah
- Budisantoso dan Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- Faisal, Herry. 2013. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan Terhadap Produktivitas dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat*. Dalam Ringkasan Tesis. Pontianak: Universitas Tanjung Pura
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : BP Universitas Diponegoro

- Sitepu, Rasidin. 2010. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia*. Dalam jurnal keuangan dan moneter, volume 13 No. 2. Medan : Fakultas pertanian UISU
- Stamboel, Kemal. 2009. *Masa Depan Pengentasan Kemiskinan*.  
<http://www.kemalstamboel.com/blog-manajemen/masa-depan-pengentasan-kemiskinan.html> Diakses 15 April 2014.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Salemba Empat
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Dalam jurnal JPMK Vol 08 No. 03. Semarang : Universitas Diponegoro
- Tambunan, Tulus. 2011. *Perekonomian Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). 2011. *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Jawa Tengah*. Jawa Tengah
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).  
<http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/> Diakses 20 April 2014
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Wahyudi, Dicky. 2013. *Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Wongdemiswati. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.  
[http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri\\_.pdf](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri_.pdf) Diakses 15 Juli 2014
- [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) Diakses 20 Juli 2014
- Zain, Machmoed. 2010. *Reformasi Pengentasan Kemiskinan : dari pendekatan ekonomi ke pendekatan kesejahteraan*. Dalam jurnal ilmiah volume 12, Nomor 4 : 79-96. Surayabaya : Universitas Airlangga

**LAMPIRAN A  
DATA MENTAH TINGKAT  
KEMISKINAN,  
PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDIDIKAN RENDAH,  
PENDIDIKAN TINGGI,  
TINGKAT KESAKITAN,  
SERTA KREDIT MODAL DI  
35 KABUPATEN/KOTA  
JAWA TENGAH TAHUN  
2008-2012**

_Magelang	2008	16,49	4,99	806576	179965	62	258662
_Magelang	2009	15,19	4,72	705445	161507	46,8	335362
_Magelang	2010	14,14	4,51	506327	122912	56,4	323387
_Magelang	2011	15,18	4,27	449822	140985	52	516421
_Magelang	2012	13,97	5,84	472930	152705	48,2	552012
_Boyolali	2008	17,08	4,04	635947	148028	51,1	603660
_Boyolali	2009	15,96	5,16	559485	167311	48,9	678784
_Boyolali	2010	13,72	3,6	385285	121702	49,9	727729
_Boyolali	2011	14,97	5,28	310370	152004	50,9	815606
_Boyolali	2012	13,88	5,66	328238	169746	49,2	972181
_Klaten	2008	21,72	3,93	670358	300408	46,8	859054
_Klaten	2009	19,68	4,24	593563	310431	43,7	895114
_Klaten	2010	17,47	1,73	329817	218855	39,9	1130056
_Klaten	2011	17,95	1,96	352141	212643	44,9	1092433
_Klaten	2012	16,71	5,54	352964	247248	44,9	1250776
_Sukoharjo	2008	12,13	4,84	450056	249479	61,8	1029761
_Sukoharjo	2009	11,51	4,76	430781	222048	51,1	1065115
_Sukoharjo	2010	10,94	4,65	243677	156849	33,9	1178763
_Sukoharjo	2011	11,13	4,59	243763	167773	35,6	1311743
_Sukoharjo	2012	10,16	5,03	231282	171205	29	1552895
_Wonogiri	2008	20,71	4,27	744082	105278	51,1	559042
_Wonogiri	2009	19,08	4,73	662387	129404	45,3	655228
_Wonogiri	2010	15,67	5,87	419378	75917	54	716646
_Wonogiri	2011	15,74	2,24	411139	73719	43,8	832793
_Wonogiri	2012	14,67	5,89	428928	79862	44,5	863956
_Karanganyar	2008	15,68	5,3	499482	180978	54,7	971551
_Karanganyar	2009	14,73	3,59	451481	196997	26,9	995973
_Karanganyar	2010	13,98	5,42	293735	133700	31,3	1067360
_Karanganyar	2011	15,29	5,5	258752	149117	26,2	1151073
_Karanganyar	2012	14,07	5,82	261204	155737	26,7	1642241
_Sragen	2008	20,83	5,69	584007	144235	45,9	891091
_Sragen	2009	19,7	6,01	520301	164417	53	961218
_Sragen	2010	17,49	6,09	351087	112662	43,1	1069135
_Sragen	2011	17,95	6,53	328376	105244	42,6	1404494
_Sragen	2012	16,72	6,6	345603	119082	36	1720231
_Grobogan	2008	19,84	5,33	984504	115141	54,6	693417

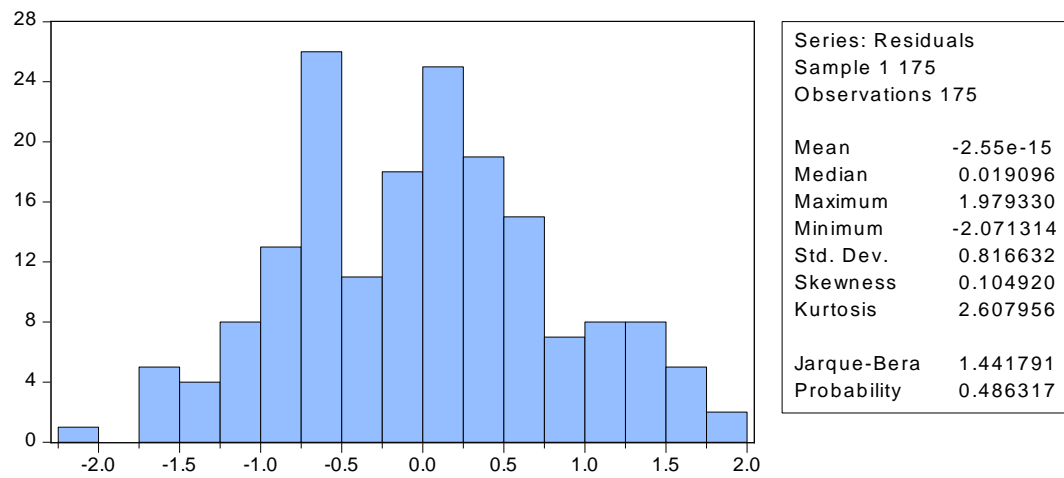
_Semarang	2010	10,5	4,9	363675	139030	44,8	1135596
_Semarang	2011	10,3	5,56	350401	115334	44,5	1406544
_Semarang	2012	9,4	6,02	380748	132858	43,1	1573568
_Temanggung	2008	16,39	3,54	511734	74660	66,4	427112
_Temanggung	2009	15,05	4,09	423072	107316	41,8	403301
_Temanggung	2010	13,46	4,31	313082	82981	35,7	478723
_Temanggung	2011	13,38	4,65	308127	52509	37,1	491279
_Temanggung	2012	12,32	5,04	336336	60833	33,6	688951
_Kendal	2008	17,87	4,26	645240	137294	60,5	549571
_Kendal	2009	16,02	4,1	588079	136428	41,9	606005
_Kendal	2010	14,47	5,97	352256	94864	41,4	721047
_Kendal	2011	14,26	5,99	365028	81486	46,2	748987
_Kendal	2012	13,17	5,54	369398	85925	44	792186
_Batang	2008	18,08	3,67	489118	82094	58,7	335936
_Batang	2009	16,61	3,72	439820	64147	57,5	400117
_Batang	2010	14,67	4,97	309801	43413	71,2	501464
_Batang	2011	13,47	5,26	295592	52133	61,5	650301
_Batang	2012	12,4	5,02	299465	57070	50,8	747032
_Pekalongan	2008	19,52	4,78	616294	78854	45,9	424597
_Pekalongan	2009	17,93	4,3	512820	97835	72,9	441918
_Pekalongan	2010	16,29	4,27	322612	79319	58,4	516447
_Pekalongan	2011	15	4,77	333660	60123	61,7	588343
_Pekalongan	2012	13,86	5,32	333985	71788	57	670411
_Pemalang	2008	23,92	4,99	992504	122282	73,6	479518
_Pemalang	2009	22,17	4,78	834632	165582	48,3	528057
_Pemalang	2010	19,96	4,94	416966	98161	58,3	638273
_Pemalang	2011	20,68	4,83	508961	82767	41,7	789621
_Pemalang	2012	19,28	5,28	500401	82271	41	816698
_Tegal	2008	15,78	5,32	996239	171123	62	847750
_Tegal	2009	13,98	5,49	895753	150350	57,7	848996
_Tegal	2010	13,11	4,83	494876	90742	51,1	965265
_Tegal	2011	11,54	4,81	547320	107015	52,2	965738
_Tegal	2012	10,75	5,25	488379	111608	56,8	1138687
_Brebes	2008	25,98	4,81	1312956	144079	67,4	903601
_Brebes	2009	24,39	4,99	1115743	155606	43,3	979726
_Brebes	2010	23,01	4,94	709699	102399	41	1059685

**LAMPIRAN B**  
**HASIL REGRESI UTAMA**  
**MODEL KEMISKINAN DI**  
**JAWA TENGAH TAHUN**  
**2008 - 2012**

**LAMPIRAN C**  
**HASIL UJI ASUMSI KLASIK**  
**MODEL KEMISKINAN DI**  
**JAWA TENGAH TAHUN**  
**2008 - 2012**



### Hasil Uji Normalitas Model Kemiskinan



## Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Kemiskinan

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.467054	Prob. F(39,135)	0.0566
Obs*R-squared	52.09083	Prob. Chi-Square(39)	0.0783
Scaled explained SS	24.92280	Prob. Chi-Square(39)	0.9610

Test Equation:

Dependent Variable: RESID<sup>2</sup>

Method: Least Squares

Date: 08/29/14 Time: 08:39

Sample: 1 175

Included observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.640040	2.532639	-0.647562	0.5184
PEK <sup>2</sup>	0.001933	0.011342	0.170454	0.8649
PDR <sup>2</sup>	2.68E-13	3.94E-13	0.681768	0.4966
PDT <sup>2</sup>	2.37E-12	4.10E-12	0.577445	0.5646
KSH <sup>2</sup>	3.75E-06	8.14E-05	0.046008	0.9634
KMD <sup>2</sup>	6.63E-14	5.33E-14	1.244808	0.2154
D1 <sup>2</sup>	1.790387	2.380981	0.751954	0.4534
D2 <sup>2</sup>	1.534412	2.271725	0.675439	0.5006
D3 <sup>2</sup>	3.144962	2.498459	1.258761	0.2103
D4 <sup>2</sup>	2.284633	2.494968	0.915697	0.3615
D5 <sup>2</sup>	2.516318	2.473638	1.017254	0.3109
D6 <sup>2</sup>	1.866191	2.478337	0.753001	0.4528
D7 <sup>2</sup>	2.667411	2.511508	1.062076	0.2901
D8 <sup>2</sup>	1.954768	2.459973	0.794630	0.4282
D9 <sup>2</sup>	2.100103	2.439874	0.860742	0.3909
D10 <sup>2</sup>	1.964354	2.306589	0.851628	0.3959
D11 <sup>2</sup>	1.497507	2.354264	0.636083	0.5258
D12 <sup>2</sup>	2.792354	2.478906	1.126446	0.2620
D13 <sup>2</sup>	2.197570	2.386923	0.920671	0.3589
D14 <sup>2</sup>	1.625809	2.406123	0.675696	0.5004
D15 <sup>2</sup>	1.629274	2.451192	0.664686	0.5074
D16 <sup>2</sup>	1.588443	2.485839	0.638997	0.5239
D17 <sup>2</sup>	3.040610	2.516541	1.208250	0.2291
D18 <sup>2</sup>	1.801510	2.359659	0.763462	0.4465
D19 <sup>2</sup>	1.844353	2.411676	0.764760	0.4457
D20 <sup>2</sup>	2.354377	2.442546	0.963903	0.3368
D21 <sup>2</sup>	1.598949	2.469853	0.647386	0.5185
D22 <sup>2</sup>	1.664738	2.395530	0.694935	0.4883
D23 <sup>2</sup>	1.978925	2.503251	0.790542	0.4306
D24 <sup>2</sup>	1.967366	2.472377	0.795739	0.4276
D25 <sup>2</sup>	2.939896	2.513112	1.169823	0.2441
D26 <sup>2</sup>	2.732864	2.505413	1.090784	0.2773
D27 <sup>2</sup>	1.608577	2.473897	0.650220	0.5167
D28 <sup>2</sup>	1.928244	2.441413	0.789806	0.4310
D29 <sup>2</sup>	1.741832	2.442332	0.713184	0.4770
D30 <sup>2</sup>	1.677985	2.517507	0.666527	0.5062
D31 <sup>2</sup>	2.118652	2.211260	0.958120	0.3397
D32 <sup>2</sup>	1.663084	2.519196	0.660164	0.5103
D33 <sup>2</sup>	2.122132	2.520600	0.841915	0.4013
D34 <sup>2</sup>	1.796458	2.517158	0.713685	0.4767
R-squared	0.297662	Mean dependent var		0.663076
Adjusted R-squared	0.094764	S.D. dependent var		0.843228
S.E. of regression	0.802280	Akaike info criterion		2.594913
Sum squared resid	86.89316	Schwarz criterion		3.318293
Log likelihood	-187.0549	Hannan-Quinn criter.		2.888337
F-statistic	1.467054	Durbin-Watson stat		2.497923
Prob(F-statistic)	0.056641			